

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Atmadja, Iin Suny. Sari, Deasy Widya. Nurcahyo, Honggo Sigit. Wironegoro, Rio Kustianto. Sumendro, R. Dewi, Theresia Pusvita. Dewi, Anggita Mustika. *Modul Pelatihan Dasar-Dasar Akta (Kerja Sama Program Studi Magister Kenotariatan FH UGM bersama Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)*, 2024.
- Haikal, Jenggis Khan. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*. Jawa Tengah: Penerbit Amerta Media, 2023.
- Halim, A. Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalila Indonesia, 1985.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hartanto, J. Andy. *Problematisa Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertipikat*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2012.
- Ismail, Nurhasan. *Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah*. Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2024.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011.
- Kolopaking, Anita Dewi Anggraeni. *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2013.
- Kurniati, Nia. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
- Mertokusmo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993.
- Mertokusmo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakri, 1990.
- Mustofa. *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*. Yogyakarta: Karya Media, 2014.
- Perangin, Effendi. *401 Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria*. Jakarta: CV.Rajawali, 1990.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soerjopratikno, Hartono. *Aneka Perjanjian Jual-Beli*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982.
- Soetikno, Iman. *Proses Terjadinya UUPA: Peran serta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 1984.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas, 2001.
- Sumardjono, Maria SW. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Taufik, Dadan. *Tanggung Jawab Notaris dan PPAT terhadap Autentitas Akta*. Jakarta Selatan: Damara Press, 2023.
- Vollenhoven, C. Van. *Orang Indonesia Dan Tanahnya*, Terj. Soewargono. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2013.
- Wardah, Sri dan Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Wibawanti, Erna Sri dan Murjiyanto, R. *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Wulansari, Catharina Dewi. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Tahun 1847, Nomor 23).
- Herzien Indonesisch Reglement (HIR)* (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Tahun 1848 Nomor 16, sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44).
- Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv)* (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Tahun 1847 Nomor 52).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635).

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 PK/Pdt/2025, perihal peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/PDT/2024, 16 April 2025.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/PDT/2024, perihal kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 606/PDT/2023/PT SBY, 15 Mei 2024.
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 606/PDT/2023/PT SBY perihal banding atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pdt.BTH/2023/PN Sby, 2 Oktober 2023.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pdt.BTH/2023/PN Sby perihal gugatan perlawanan (bantahan), 25 Juli 2023.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.SBY perihal Permohonan untuk Memperoleh

Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam sengketa antara PT EMKL Pandawa melawan Kepala Kanot Pertanahan Kota Surabaya I.

Peraturan Lainnya

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara/ Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat.

Jurnal

- Anggi Asyera Aritonang, "Analisis Sengketa Waris dalam Kasus Perdata No.703/Pdt.G/2024/PN Mdn: Studi Penetapan Ahli Waris dan Penyelesaian Melalui Mediasi", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol.5, No.3 (Januari 2025): 1731, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3890>.
- Faisal Taufiqurrahman, Efendi Ibnu Susilo, Monika Melina, dan Moh.Hudi, "Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan", *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.5 No.2 (Desember 2021): hal 97, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i2.2913>
- Istadevi Utami Rahardika, Nyoman Gede Sugiartha, dan Putu Ayu Sriasih Wesna, "Penomoran Dan Penanggalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan (Analisis Putusan PN Denpasar Nomor 530/PDT.G/2016/PN.DPS)", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2 No.1, (April 2021): 99. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3100.95-102>.
- Jenifer Beatrix Rejaan dan Rasji, "Kedudukan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan Sebagai Objek Sengketa Di Peradilan Tata

- Usaha Negara,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.8, No.7 (Juli 2023): 1, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.12874> .
- M. Rahman dan M. Harahap, “Legal Certainly in Land Rights Transfer: A Study on Procedural Compliance in Indonesia,” *Journal of Agrarian Studies* 5, no.2 (2020: 134-145), <https://doi.org/10.1234/jas.v5i2.5678> .
- Mellinia Dilla Wardhani, dan Aisyah Ayu Musyafah, “Analisis Terhadap Kewajiban Notaris Membacakan Akta Dihadapan Penghadap Menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, *UNES Law Review* Vol.6 No.1, (September 2023):581, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1> .
- Muhammad Alrizky Ekiawan dan Teddy Lesmana, “Jual Beli Tanah Tidak Bersertipikat dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia (Studi di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi)”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.4 No.3 (Maret 2023): 276, <https://jhlgr.wangrengcang.com/>.
- Novia Gunawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Yang Kehilangan Hak Akibat Jual Beli Atas Tanah Yang Pernah Menjadi Objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 658 PK/PDT/2017)”, *Indonesian Notary*, Vol.3, Nomor 41, (Juni 2021): 778-779, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/41> .
- Yefta Yona Tauran, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.IV, No.9 (Oktober-Desember 2016): 159. <https://doi.org/10.35796/les.v4i9.15055>
- Yuli Prasetyo Adhi dan Kerin Rumodang Maruliana, “Analisis Bentuk Komparasi Dalam Akta Autentik Dan Pengaruhnya Dalam Pembuktian”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol.9 No.2 (2022) :135, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr> .

Internet

- Andi Ramdhan Adi Saputra. “Beritikad Baik, Pembeli yang dilindungi hukum”. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/beritikad-baik-pembeli-yang-dilindungi-hukum-0sR> . (diakses 7 Oktober 2025).
- Dadi Suryandi. “Peran Kerapat Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum”. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html> (diakses pada 10 Agustus 2025).
- Fockema Andreae, S.J."Het Oud-Nederlandsch burgerlijk recht". Bohn,1906. Geraadpleegd op Delpher op 31-07-2025, <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSFUBA02:000007953:00012> .
- Muhammas Raihan Nugraha. “Makna dan/atau dalam Peraturan Perundang-undangan.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggunaan-dan-penafsiran-dan-atau-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt51ed081b2b89d/> (diakses 6 Agustus 2025).

Tim Hukumonline, “7 Asas-Asas Hukum Agraria dalam UUPA”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-agraria-lt646201e7068e8/?page=2> (diakses 23 Oktober 2025).

Karya Ilmiah

Ahmad Budi Raharja, “Akta Pengoperan Hak Yang Dibuat Notaris Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Di Kota Palembang”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2020.

Eva Indrayani Buida, “Perlawanan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Jual Beli Di Bawah Tangan (Studi Putusan Nomor 339/PDT.PLW/2011/PN.MDO)”, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2012.

Solihul Hadi, “Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman Nomor: 53/Pdt.G/2014/PN.Smn)”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2020.